

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda, berdaulat dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat tertib dan damai (GBHN RI, 1993-1998).

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, oleh karena itu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya harus dinikmati penduduk, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat dinikmati penduduk jika pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi (Suseno, 1990:35).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan

dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut tidak hanya menunjukan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut didistribusikan dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi tetapi seberapa jauh pembangunan telah berhasil menyejahterakan masyarakatnya (Sadono, 1985:19).

Sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam komponen produk domestik regional bruto adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan, sektor jasa-jasa.

Secara teoritis struktur ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan. Dumairy (2004: 46) membagi struktur ekonomi berdasarkan empat tinjauan. Pertama, berdasarkan tinjauan makro sektoral, yang membagi perekonomian menjadi struktur agraris (*agriculture*). Industrial (*industrial*) atau niaga (*commerce*), tergantung pada sektor apa yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu wilayah. Kedua, berdasarkan tinjauan keruangan (*spacial*), yang membagi perekonomian menjadi struktur pedesaan (tradisional) atau perkotaan (modern). Ketiga, berdasarkan tinjauan

penyelenggaraan, yang menjadi perekonomian berstruktur etatis, egaliter atau borjuis. Predikat ini tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam kegiatan perekonomian suatu wilayah. Keempat, struktur ekonomi yang sentralistik atau desentralistik.

Berkaitan dengan struktur ekonomi wilayah, Todaro (2000: 122) menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan dari aktivitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Suatu wilayah yang sedang berkembang proses pertumbuhan ekonominya akan tercermin dari pergeseran sektor ekonominya, yaitu peran sektor pertanian dalam PDB atau PDRB akan mengalami penurunan, sedangkan peran sektor non pertanian akan semakin meningkat.

Menurut Widodo (2006: 111-112) ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasikan potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau yang mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa yang akan datang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Perkembangan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Istilah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa ada dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan memperoleh manfaat perdagangan (*gains from trade*). Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional. Keunggulan komparatif lebih menekankan kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan suatu daerah, seperti: kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain.

Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2004:76).

Sementara itu, keunggulan kompetitif lebih menekankan efisiensi pengelolaan sumber daya terkait dengan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Pada aspek produksi keunggulan atau daya saing wilayah komoditas dapat dikaji dengan melihat sejauh mana wilayah itu memiliki basis (*basic*

sector) atau keunggulan dalam penciptaan nilai tambah dan keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja dengan produktifitas tinggi (*basic employment*). Oleh karena itu, keunggulan dan daya saing wilayah komoditas dalam lingkup produksi dapat dikaji dengan *Competitif Productivity of Labor Index* atau *Competitif Labor Index* (CLI) yaitu membandingkan nilai tambah (*basic*) dan produktifitas tinggi (*employment*). Secara umum, keunggulan komparatif akan menuju keunggulan kompetitif. Artinya, kepemilikan faktor produksi (*endowment*) yang melimpah memungkinkan untuk mencapai kondisi skala ekonomis yang efisien (*economic of scale*) yang merupakan landasan keunggulan kompetitif. Tetapi, keunggulan kompetitif juga dapat diraih tanpa harus memiliki keunggulan komparatif yaitu ketika suatu daerah berhasil mengelola sumber daya yang sedikit tersebut secara efisien.

Era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini telah banyak membawa perubahan dalam berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan. Salah satu perubahan dalam pemerintahan adalah mulai diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalam UU.No.22/1999 mengenai pemerintahan daerah dan UU.No.25/1999 mengenai perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Dalam UU.No.22/1999 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai perundang-undangan (Nurhayati, Siti Fatimah, 2002:16).

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ini karena daerah akan diberi peran yang lebih besar melalui penyerahan semua urusan pemerintahan serta sumber-sumber keuangannya, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan perencanaan sosial. Ketidakmampuan keuangan pusat akibat krisis ekonomi, mengakibatkan daerah diberikan wewenang untuk mencari sumber-sumber pendapatan dan mengurus kebutuhan sendiri agar beban pemerintahan pusat menjadi berkurang (Mafruhah, Izza, 2001:110).

Pelaksanaan desentralisasi versi Undang-Undang No.22/1999 akan berbeda dengan Undang-Undang No.5/1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, karena saat itu pelaksanaan desentralisasi dalam situasi dan kondisi yang kurang kondusif (masa orde baru). Kabupaten atau kota (dulu daerah tingkat II) yang dijadikan sebagai desentralisasi, melalui otonomi daerah lebih didasarkan pada pertimbangan (Kuncoro,1997) :

Dimensi politik : dikota atau kabupaten dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga resiko separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi relatif kerja.

Dimensi administratif : penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Dimensi kebutuhan dan potensi rakyat dikota atau kabupaten sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan *local accountability* terhadap masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberdayaan potensi daerah akan bisa berjalan jika sektor unggulan (*spesialisasi sector*) daerah dapat dioptimalkan. Sektor unggulan ini penting untuk diketahui guna menentukan skala prioritas dalam pembangunan. Sektor unggulan (*spesialisasi sector*) tersebut adalah sektor yang memenangkan persaingan dibandingkan dengan sektor lainnya (Yuwono, 1999).

Spesialisasi sektor ini akan menjadi ciri khas di suatu daerah. Demikian pula dengan Kabupaten Grobogan dalam mendukung pertumbuhan ekonominya maka perlu mengidentifikasi sektor-sektor mana yang dapat diunggulkan dan dapat memberikan hasil yang cukup baik dan diharapkan sebagai solusi alternatif, sehingga dapat mendukung sektor-sektor lain yang belum berkembang. Sektor-sektor perekonomian tersebut diambil dari lapangan usaha utama sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor lain yang belum berkembang.

B. PERUSUMUSAN MASALAH

Penentuan prioritas pembangunan dalam pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh.

Daerah harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dimilikinya, kendala-kendala yang akan dihadapi dan peluang-peluang yang ada untuk dapat merencanakan pembangunan daerah secara tepat.

Dari identifikasi terhadap potensi yang ada di Kabupaten Grobogan maka dapat ditentukan sektor-sektor yang dapat diunggulkan. Penentuan sektor unggulan akan memberikan kerangka bagi daerah untuk memberdayakan sektor tersebut secara optimal. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah sektor apa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Grobogan, faktor-faktor apa yang menentukan keunggulan sektor tersebut, serta bagaimana cara mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan dengan memperhitungkan kelemahan, kekuatan, ancaman maupun peluang yang ada.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Grobogan.
2. Bagaimana cara mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan dan membudidayakan sektor unggulan tersebut sehingga berdayaguna dan berhasilguna.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan pembangunan secara tepat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan PDRB per sektor dari masing-masing daerah yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

E. METODE PENELITIAN

Kajian ini terbatas pada ruang lingkup Kabupaten Grobogan yaitu mengenai sektor unggulan, komoditas unggulan dan daya saing komoditas di Kabupaten Grobogan. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2002-2007 yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan, BPS Propinsi Jawa Tengah dan data primer tahun 2002-2007.

Variabel penelitian yang ada akan dikaji menggunakan pendekatan nilai tambah akhir produksi baik menggunakan data PDRB maupun data primer, dan jumlah tenaga kerja. Sehingga diperoleh produktivitas sektor basis yang menjadi tolak ukur daya saing wilayah komoditas unggulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *shift share* Esteban-Marquillas. Analisis *shift share* Esteban Marquillas merupakan modifikasi dari analisis *shift share* klasik. Modifikasi tersebut meliputi pendefinisian kembali kedudukan

atau keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari teknik *shift share* dan menciptakan komponen *shift share* yang keempat yaitu pengaruh alokasi (A_{ij}). Rumus analisis *shift share* Esteban-Marquillas adalah (Hermanto,2000) :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C'_{ij} + A_{ij} \quad (1)$$

D_{ij} positif dan besar menunjukkan kinerja sektor tersebut lebih unggul dibanding kinerja perekonomian wilayah yang menjadi perbandinganya.

C'_{ij} mengukur keunggulan dan ketidakunggulan kompetitif di sektor i di perekonomian daerah j dengan rumus (Hermanto,2000) :

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (2)$$

Keterangan :

D_{ij} = *Performance* (kinerja) sektor i wilayah j

N_{ij} = pertumbuhan sektor i wilayah j

M_{ij} = Bauran industri sektor i wilayah j

C'_{ij} = Keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j

A_{ij} = Pengukur keunggulan dan ketidakunggulan

E_{ij} = Kesempatan kerja sektor i di daerah j

r_{ij} = Laju pertumbuhan disektor i di daerah j

rin = laju pertumbuhan disektor i tingkat regional

E'_{ij} merupakan *homothetic PDRB* di sektor i di daerah j yang nilainya adalah (Hermanto, 2000) :

$$E'_{ij} = E_j \cdot (E_{in} / E_n) \quad (3)$$

Keterangan :

E'_{ij} = Kesempatan kerja sektor i di daerah j (*homothetic PDRB*)

E_{ij} = Kesempatan kerja sektor i di daerah j

E_{in} = Kesempatan kerja sektor i di tingkat regional

E_n = Kesempatan kerja pada tingkat regional

Pengaruh alokasi atau *allocation effect* untuk sektor i di wilayah j dirumuskan sebagai berikut (Hermanto,2000) :

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij}) \cdot (r_{ij} - rin) \quad (4)$$

Keterangan :

A_{ij} = pengaruh alokasi

A_{ij} adalah bagian dari pengaruh (keunggulan) kompetitif tradisional (klasik) yang menunjukkan adanya tingkat spesialisasi dan keunggulan kompetitif di sektor i di daerah j. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa juga

suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik. Efek alokasi (A_{ij}) dapat bernilai positif atau negatif. Efek alokasi yang negatif mempunyai dua kemungkinan yang berkebalikan dengan efek alokasi yang positif (lihat tabel 1-1).

Tabel 1-1

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN DARI PENGARUH ALOKASI

No	Pengaruh Alokasi (A_{ij})	Komponen		Definisi
		$(E_{ij} - E'_{ij})$	$(r_{ij} - r_{in})$	
1	-	+	-	Tidak ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi
2	+	-	-	Tidak ada keunggulan kompetitif, tidak ada spesialisasi
3	-	-	+	Ada keunggulan kompetitif tidak ada spesialisasi
4	+	+	+	Ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi

Sumber : Hermanto, 2000

Metode analisis sektor basis dan metode analisis daya saing menggunakan pendekatan *Location Quotient Index* atau indeks LQ.

Pendekatan LQ merupakan suatu teknik analisis untuk menentukan potensi spesialisasi suatu daerah terhadap aktifitas ekonomi utama, atau untuk menentukan sektor unggulan yaitu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan daerah lain. Formulasi dari LQ adalah (Arsyad, 1999) :

$$LQ = vi/vt : Vi/Vt$$

Atau

$$LQ = vi/Vi : vt/Vt$$

Keterangan :

vi = pendapatan sektor tertentu pada suatu daerah (dalam jutaan Rp)

vt = total pendapatan daerah tersebut (dalam jutaan Rp)

Vi = pendapatan sektor sejenis secara regional atau nasional (dalam jutaan Rp)

Vt = total pendapatan regional atau nasional (dalam milyar Rp)

Berdasarkan formulasi diatas maka apabila :

1. $LQ > 1$ berarti daerah mempunyai basis pada sektor tersebut dan ada kelebihan hasil yang dapat dipasarkan ke daerah lain.
2. $LQ = 1$ berarti hasil sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.
3. $LQ < 1$ berarti hasil sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga perlu mendatangkannya dari daerah lain.

Bila daerah memiliki beberapa sektor dengan nilai $LQ > 1$ maka, sektor yang mempunyai LQ paling besar merupakan sektor basis.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang pembangunan ekonomi daerah, teori-teori pembangunan daerah, strategi pengembangan ekonomi daerah, peran pemerintah dalam pembangunan daerah, perencanaan pembangunan, perubahan struktur ekonomi, macam dan definisi pendapatan regional, paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah, teori pertumbuhan ekonomi wilayah, teori pembangunan daerah, konsep pembangunan daerah, strategi pembangunan ekonomi daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang obyek penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, penurunan model shift share, metode dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi daerah penelitian, kondisi penduduk, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala dalam penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN